COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024 DI KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

WURY WULAN NINGRUM
NPP. 32.0711
Asdaf Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah
Email: 32.0711@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. M. B. Zubakhrum Tjenreng. M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The implementation of the 2024 General Election in Pontianak City took place amidst social diversity and technical complexities, requiring strong coordination and collaboration among key stakeholders. Collaborative practices between actors such as the General Elections Commission (KPU), Election Supervisory Agency (Bawaslu), National Unity and Politics Agency (Kesbangpol), security forces, local media, and the public are crucial to ensure a democratic and inclusive election process. However, in-depth studies on the application of collaborative governance in the context of local-level elections remain limited.* ***Purpose:*** *This study aims to examine how collaborative governance was implemented in the 2024 General Election in Pontianak City and to identify the challenges faced in the collaboration process.* ***Method****: This research uses a descriptive qualitative method with a theoretical approach based on the collaborative governance framework by Emerson, Nabatchi, and Balogh (2012). Data were collected through in-depth interviews and documentation, focusing on the dynamics of collaboration, collaborative actions, and the resulting impacts and adaptations.* ***Result:*** *Based on the analysis using Emerson et al.'s (2012) collaborative governance framework, the implementation of collaboration in the 2024 General Election in Pontianak City was not fully optimal. The collaboration among stakeholders faced several challenges such as sectoral egos, weak inter-agency coordination, and uneven public participation.* ***Conclusion:*** *Collaborative efforts in the 2024 General Election in Pontianak demonstrate positive joint initiatives; however, improvements are still needed in terms of coordination, ongoing evaluation, and strengthening each actor's capacity. The main recommendation of this study is the establishment of a sustainable collaborative evaluation mechanism and an adaptive approach that aligns with the roles and capacities of each stakeholder in electoral governance.*

Keywords: *Collaborative Governance, General Election 2024, Electoral Management, Pontianak City*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Pontianak berlangsung di tengah keberagaman sosial dan kompleksitas teknis, yang menuntut adanya koordinasi dan kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan. Praktik kolaboratif antara aktor-aktor seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kesbangpol, aparat keamanan, media lokal, dan masyarakat menjadi hal yang krusial demi terciptanya pemilu yang demokratis dan inklusif. Namun, kajian yang mendalam mengenai penerapan *collaborative governance* dalam konteks pemilu di tingkat daerah masih sangat terbatas. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *collaborative governance* dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Pontianak serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses kolaborasi tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori *collaborative governance* dari Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi terhadap pelaksanaan kolaborasi antar aktor pemilu yaitu dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan kolaborasi, serta dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan analisis menggunakan teori *Collaborative governance* Emerson et al. (2012), pelaksanaan kolaborasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Pontianak belum sepenuhnya optimal. Kolaborasi antar stakeholder masih menghadapi tantangan seperti ego sektoral, lemahnya koordinasi, dan partisipasi masyarakat yang belum merata. **Kesimpulan:** Kolaborasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Pontianak menunjukkan adanya upaya bersama yang positif, namun masih perlu ditingkatkan dari segi koordinasi, evaluasi berkelanjutan, serta penguatan kapasitas masing-masing aktor. Rekomendasi utama dari penelitian ini adalah perlunya pembentukan mekanisme evaluasi kolaboratif yang berkelanjutan dan pendekatan yang adaptif terhadap peran dan kapasitas tiap aktor dalam tata kelola pemilu.

Kata kunci: Tata Kelola Kolaboratif, Pemilu 2024, Penyelenggaraan Pemilu, Kota Pontianak

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar utama demokrasi yang memungkinkan masyarakat memilih wakilnya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Tjenreng, 2020). Penyelenggaraan pemilu di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak tahun 1955 hingga pemilu serentak 2024(Labolo & Ilham, 2015). Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu, melainkan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, Kesbangpol, aparat keamanan, media, dan masyarakat sipil(Wasistiono & Polyando, 2017).

Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pemilu. Keberagaman demografis, sosial, dan budaya di kota ini menuntut penyelenggaraan pemilu yang inklusif, aman, dan transparan melalui mekanisme kolaboratif yang kuat. Data Disdukcapil Kota Pontianak mencatat keberagaman agama yang signifikan, yang memperkuat urgensi kolaborasi dalam menjaga harmonisasi dalam pemilu.

Pendekatan ***collaborative governance***, seperti yang dijelaskan (Partheymüller et al., 2022) mendorong kerja sama antar pihak dalam menangani isu-isu publik yang kompleks, termasuk pemilu. Namun, kajian mengenai penerapan kolaborasi dalam konteks pemilu di tingkat lokal, khususnya di Kota Pontianak, masih terbatas. Penelitian terdahulu cenderung berfokus pada kolaborasi di tingkat nasional atau sektor publik secara umum.

Dengan merujuk pada teori *Collaborative Governance* (Emerson et al., 2012) penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses kolaborasi antar stakeholder dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Pontianak, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Fokus utama penelitian mencakup interaksi dan koordinasi antara KPU, Bawaslu, Kesbangpol, aparat keamanan, media, dan masyarakat sipil.

Penelitian ini penting untuk mengisi kesenjangan literatur terkait praktik *collaborative governance* dalam pemilu di tingkat lokal. Selain itu, hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis guna memperkuat kualitas demokrasi, transparansi, partisipasi publik, serta koordinasi antar lembaga dalam penyelenggaraan pemilu yang akan datang (Nurdin et al., 2022).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas kolaborasi pemilu pada tingkat nasional atau terbatas pada aspek prosedural kelembagaan atau hanya menyoroti peran individu lembaga seperti KPU dan Bawaslu secara terpisah. Belum banyak kajian yang menganalisis proses kolaboratif antar stakeholder di tingkat lokal menggunakan perspektif teori *Collaborative Governance* (Emerson et al., 2012). Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian terkait dinamika kolaborasi penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Pontianak secara lebih mendalam.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada beberapa studi sebelumnya. (Tambun et al., 2023) menyoroti pentingnya sinergi antara KPU dan Bawaslu, namun belum menggunakan pendekatan *collaborative governance*. Penelitian lain di NTT membahas kolaborasi pada tahap pencalonan, tetapi hanya terbatas pada satu tahapan pemilu. (Stevano Parulian Nahampun et al., 2022) meneliti kerja sama KPU dan Kesbangpol dalam meningkatkan partisipasi pemilih, sementara (Mauluduni, 2022) membahas relasi kelembagaan antar penyelenggara pemilu dari perspektif sosiologis. Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, studi ini menggunakan teori *collaborative governance* dari (Emerson et al., 2012) serta mencakup lebih banyak aktor, seperti KPU, Bawaslu, Kesbangpol, aparat keamanan, media lokal, dan masyarakat dalam konteks Pemilu 2024 di Kota Pontianak. Penelitian ini juga memetakan proses kolaborasi melalui dimensi dinamika, tindakan, dan tantangan kolaboratif secara menyeluruh.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya karena secara spesifik menganalisis proses *collaborative governance* dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Pontianak dengan pendekatan teori (Emerson et al., 2012). Berbeda dengan (Tambun et al., 2023) yang hanya menekankan pada komunikasi antar lembaga secara umum, serta (Mauluduni, 2022) yang lebih menyoroti hubungan kelembagaan antara KPU dan Bawaslu tanpa pendekatan teoretis yang spesifik, penelitian ini mengintegrasikan seluruh aktor kunci yaitu KPU, Bawaslu, Kesbangpol, aparat keamanan, media lokal, dan masyarakat dalam satu kerangka kolaboratif yang komprehensif.

Lebih lanjut, penelitian ini juga memperluas cakupan dibandingkan (Stevano Parulian Nahampun et al., 2022) yang hanya membahas kolaborasi KPU dan Kesbangpol dalam konteks partisipasi politik di Kalimantan Tengah, serta dibandingkan studi di NTT yang fokus pada

tahapan pencalonan saja. Dengan membahas tiga dimensi utama *collaborative governance* yaitu dinamika kolaborasi, tindakan kolaboratif, dan tantangan implementasi penelitian ini menyajikan analisis yang lebih mendalam terhadap dinamika lokal di Kota Pontianak. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan model tata kelola kolaboratif di bidang kepemiluan, khususnya di tingkat daerah (Birnir et al., 2025).

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai *collaborative governance*, dan tantangan dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. (Denzin et al., 2006), menjelaskan bahwa kualitas penelitian kualitatif berfokus pada bagaimana individu berinteraksi dengan dunia sosial mereka dan bagaimana mereka memberikan makna terhadap pengalaman tersebut. Menurut (Rijal Fadli, 2021) dalam (Bogdan & Biklen, 2003) pendekatan kualitatif seperti orang yang ingin piknik, sehingga tidak tahu harus pergi kemana, dan belum tahu pasti apa yang ada di sana. Ia akan mendapatkan pengetahuan setelah memasuki objek, dengan membaca berbagai informasi tertulis, gambar - gambar, berpikir dan melihat hal-hal dan aktivitas orang di sekitarnya, melakukan wawancara, dan sebagainya setelah tiba di lokasi.

Instrumen utama dalam pengumpulan data untuk penelitian kualitatif adalah manusia, yang dapat berupa peneliti itu sendiri atau pihak lain yang terlibat dalam proses penelitian(Labolo, 2023). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peneliti itu sendiri berfungsi sebagai instrumen dalam penelitian. Menurut (Kumar Ranjit, 2019) pengumpulan data merupakan aktivitas yang berfokus pada pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang akan digunakan untuk analisis lebih lanjut. Wawancara dilakukan untuk memeperoleh data yang dibutuhkan. Menurut (Stoetzer et al., 2025) pengumpulan data merupakan aktivitas yang berfokus pada pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang akan digunakan untuk analisis lebih lanjut Penelitian ini menggunakan metode wawancara semistruktur. Wawancara semistruktur dilakukan sebagai upaya menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Dan penelitian ini menggunakan dokumentasi dalam bentuk pengambilan foto antara peneliti dan narasumber, serta dokumentasi dari akun media sosial lembaga informan, dilakukan sebagai bukti pelaksanaan wawancara untuk mendukung validitas data dan menunjukkan bahwa peneliti telah mengumpulkan data secara langsung dari sumber yang bersangkutan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Bawaslu Kota Pontianak, Ketua KPU Kota Pontianak, Kepala Kesbangpol Kota Pontianak, Anggota Polri dan TNI, Redaktur Media Lokal serta Masyarakat seperti tokoh masyarakat, mahasiswa, dan pengamat pemilu independen. Analisis data dilakukan berdasarkan indikator *collaborastive governance* dari (Emerson et al., 2012) yang meliputi dinamika kolaborasi, tindakan kolaboratif, dan tantangan implementasi. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai *collaborative governance* dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Proses *Collaborative Governance* dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat

Hasil Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Pontianak menunjukkan praktik *collaborative governance* yang dinamis antar berbagai *stakeholder*, seperti KPU, Bawaslu, Kesbangpol, aparat keamanan, media lokal, dan masyarakat. Berdasarkan kerangka teori (Emerson et al., 2012) proses ini mencakup keterlibatan berbagai pihak dalam membangun prinsip bersama, motivasi kolektif, kapasitas bertindak, hingga tindakan nyata dan dampaknya terhadap proses demokrasi.

Prinsip bersama atau principled engagement terlihat dari terbentuknya komunikasi dan kesepakatan awal antar lembaga. Rapat koordinasi menjadi sarana penting untuk menyelaraskan pemahaman dan tugas masing-masing. Ketua KPU Kota Pontianak, David Teguh M., menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor agar tidak terjadi tumpang tindih tugas, sedangkan Ketua Bawaslu Ridwan, SE.I., M.S.I., menyebutkan keterbukaan informasi dan kerja sama sebagai kunci pencegahan pelanggaran.

Motivasi bersama turut menjadi penggerak kolaborasi. Dorongan untuk mewujudkan pemilu yang damai dan partisipatif menjadi semangat bersama. Kepala Kesbangpol Kota Pontianak, Yudi Arman, menyampaikan bahwa kolaborasi adalah kebutuhan kolektif untuk menjaga stabilitas politik. Media lokal seperti Pontianak Post juga merasa berkepentingan menyebarkan informasi akurat guna meningkatkan kepercayaan publik.

Dalam aspek kapasitas bertindak, para stakeholder menunjukkan kemampuan dalam membangun mekanisme kerja sama melalui prosedur teknis, kepemimpinan terbuka, dan pertukaran pengetahuan. KPU membentuk kelompok kerja teknis dan menjalin MoU dengan aparat keamanan dan kelompok masyarakat. Bawaslu mendorong pengawasan partisipatif, dan Kesbangpol memfasilitasi forum lintas sektor. Meski demikian, keterbatasan sumber daya menjadi kendala umum. Beberapa kegiatan sosialisasi hanya menggunakan media sederhana, dan partisipasi masyarakat belum optimal.

Tindakan kolaboratif tercermin dalam kegiatan fasilitasi dan upaya menjaga keberlanjutan kerja sama. KPU secara aktif membentuk pokja, sedangkan Bawaslu dan Kesbangpol terlibat dalam tim terpadu pengawasan dan evaluasi tahapan pemilu. Media lokal juga mengambil bagian dengan menyebarluaskan informasi dan menginisiasi diskusi publik. Forum seperti Focus Group Discussion dan Dialog Pasca Pemilu menjadi bukti adanya kesinambungan kolaborasi.

Dampak dari kolaborasi ini terbagi dalam tiga kategori. Dampak yang diharapkan mencakup meningkatnya efektivitas pemilu, stabilitas politik, dan kepercayaan publik. Dampak yang tidak diharapkan antara lain lambatnya pengambilan keputusan dan munculnya ego sektoral. Sementara dampak tidak terduga meliputi meningkatnya partisipasi pemuda, inisiatif media dalam edukasi publik, dan munculnya kesadaran akan ketimpangan informasi di wilayah tertentu.

Secara keseluruhan, proses *collaborative governance* dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Pontianak telah menunjukkan arah yang positif meskipun belum optimal. Kolaborasi antarlembaga telah berjalan melalui forum koordinasi, pembentukan tim teknis, dan pelibatan masyarakat, namun masih perlu diperkuat dalam aspek kesinambungan, evaluasi bersama, dan distribusi sumber daya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi lintas

sektor menjadi kunci penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, aman, dan inklusif di tingkat lokal.

3.2. Tantangan Dalam Proses Pelaksanaan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat

Pelaksanaan *collaborative governance* dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Pontianak masih menghadapi sejumlah tantangan yang memengaruhi efektivitas kolaborasi antar stakeholder. Berdasarkan teori *Collaborative Governance* dari (Emerson et al., 2012)), tantangan tersebut mencakup beberapa dimensi penting yang belum berjalan optimal.

Pertama, keterbatasan sumber daya menjadi kendala utama. Minimnya anggaran, fasilitas, dan dukungan teknis menghambat kelancaran kegiatan sosialisasi dan partisipasi masyarakat, khususnya di wilayah pinggiran. Hal ini mencerminkan lemahnya subdimensi *capacity for joint action*, terutama pada aspek penyediaan sumber daya yang merata dan memadai.

Kedua, belum terbangunnya kesepahaman jangka panjang antar aktor juga menjadi persoalan. Meskipun forum koordinasi telah rutin dilakukan, kolaborasi cenderung bersifat jangka pendek dan situasional, tanpa adanya mekanisme evaluasi kolaboratif yang berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa dimensi *principled engagement* belum sepenuhnya terbentuk secara struktural dan berkesinambungan.

Ketiga, partisipasi masyarakat dalam kolaborasi masih terbatas. Masyarakat cenderung hanya dilibatkan sebagai objek sosialisasi, bukan sebagai mitra aktif dalam pengawasan atau perumusan solusi. Lemahnya pemberdayaan masyarakat menunjukkan tantangan dalam memperkuat kapasitas kolektif, yang juga merupakan bagian dari *capacity for joint action*.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kolaborasi antar stakeholder pemilu di Kota Pontianak belum sepenuhnya optimal. Diperlukan penguatan sumber daya, pengembangan kesepahaman jangka panjang, dan peningkatan partisipasi masyarakat agar kolaborasi dapat berjalan secara lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses *collaborative governance* dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Pontianak telah berjalan dalam arah yang positif, namun belum sepenuhnya optimal. Kolaborasi antar *stakeholder* seperti KPU, Bawaslu, Kesbangpol, aparat keamanan, media, dan masyarakat telah membentuk forum koordinasi, mekanisme kerja teknis, serta partisipasi masyarakat dalam beberapa tahapan penting. Namun, masih ditemukan berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, belum terbangunnya kesepahaman jangka panjang, serta rendahnya partisipasi masyarakat secara aktif. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun struktur kolaborasi telah dibentuk, perlu penguatan aspek keberlanjutan dan pendalaman hubungan antar lembaga.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian (Tambun et al., 2023) yang menekankan pentingnya sinergi komunikasi antar lembaga seperti KPU dan Bawaslu dalam menjamin transparansi dan efektivitas pemilu. Penelitian Tambun juga menggunakan metode kualitatif dan menggambarkan bahwa kerja sama kelembagaan merupakan fondasi dalam penyelenggaraan pemilu yang kredibel, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian ini.

Namun, penelitian Tambun belum menyoroti partisipasi aktor lain seperti aparat keamanan dan masyarakat sipil sebagaimana yang dianalisis dalam penelitian ini.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan studi (Stevano Parulian Nahampun et al., 2022) mengenai kolaborasi antara Kesbangpol dan KPU di Kabupaten Kotawaringin Timur. Nahampun menyebutkan bahwa partisipasi politik meningkat karena sinergi dua lembaga tersebut, meskipun masih menghadapi kendala teknis dan sosialisasi. Penelitian ini memperluas temuan Nahampun dengan mengidentifikasi peran stakeholder lain dan menyajikan dinamika yang lebih kompleks dalam pelibatan masyarakat dan media, serta tantangan koordinasi lintas sektor yang lebih luas.

Berbeda dengan penelitian "Urgensi Desain *Collaborative Governance* dalam Pemilu dan Pilkada" di NTT, penelitian ini tidak berfokus pada kelemahan dalam proses pencalonan, melainkan pada dinamika koordinasi dan pelaksanaan di lapangan selama seluruh tahapan pemilu. Meski sama-sama menekankan pentingnya kolaborasi, penelitian ini lebih menyoroti implementasi langsung dalam konteks lokal Kota Pontianak, termasuk penanganan isu sosial, informasi pemilu, dan pengawasan partisipatif.

Sementara itu, penelitian (Mauluduni, 2022) yang menyoroti konflik antar badan penyelenggara pemilu memperlihatkan bagaimana ketidakharmonisan komunikasi dapat menjadi penghambat utama dalam kerja kelembagaan. Temuan ini berbeda dari penelitian ini yang menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan persepsi dan ego sektoral, *stakeholder* di Kota Pontianak mampu menjaga komunikasi dan sinergi dalam batas yang konstruktif. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi *collaborative governance* dapat meredam potensi konflik bila difasilitasi dengan forum dan kepemimpinan yang inklusif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa temuan penelitian ini memperkaya wacana tentang praktik *collaborative governance* di tingkat daerah dalam konteks pemilu. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya, konsistensi forum evaluasi lintas sektor, dan pelibatan masyarakat dalam proses kolaboratif secara aktif. Hasil ini menunjukkan kontribusi penting terhadap pengembangan praktik demokrasi yang partisipatif dan responsif, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di daerah dengan karakter sosial-politik yang kompleks seperti Kota Pontianak.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Salah satu temuan menarik dari penelitian ini adalah peran signifikan media lokal dalam mendukung proses kolaboratif penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Pontianak. Meskipun media sering kali diposisikan sebagai pihak eksternal dalam proses pemilu, temuan menunjukkan bahwa media seperti *Pontianak Post* dan RRI Pontianak justru menjadi aktor strategis dalam menyebarluaskan informasi, mengklarifikasi isu sensitif, hingga memfasilitasi diskusi publik yang mendorong peningkatan literasi politik. Kehadiran media dalam forum formal seperti rapat koordinasi serta partisipasi mereka dalam kegiatan sosialisasi memperkuat fungsi edukatif dan pengawasan partisipatif yang sering kali tidak terlihat secara formal dalam struktur kelembagaan.

Selain itu, keterlibatan kalangan muda, khususnya mahasiswa, juga menjadi temuan menarik yang tidak direncanakan sebelumnya. Kegiatan "*KPU Goes to Campus*" yang awalnya hanya dirancang sebagai sosialisasi pasif, justru berkembang menjadi ruang dialog kritis yang menunjukkan tingginya antusiasme mahasiswa terhadap isu-isu demokrasi, janji kampanye, dan peran pemilih muda. Fenomena ini membuka wawasan baru bahwa generasi muda bukan hanya sebagai target sosialisasi, tetapi dapat berperan sebagai agen penggerak partisipasi politik. Temuan ini menjadi catatan penting dalam memperkuat model kolaboratif yang lebih inklusif di masa mendatang.

Di sisi lain, ditemukan pula ketimpangan penyebaran informasi yang terjadi di wilayah pinggiran Kota Pontianak. Forum-forum diskusi publik yang diinisiasi oleh Kesbangpol mengungkap bahwa sebagian masyarakat di kecamatan luar kota masih minim akses terhadap informasi tahapan pemilu. Hal ini menandakan bahwa kanal komunikasi yang dibangun belum menjangkau seluruh wilayah secara merata, dan perlu ditingkatkan melalui pendekatan berbasis komunitas lokal. Ketimpangan ini menunjukkan pentingnya membangun jaringan komunikasi kolaboratif yang lebih luas, melibatkan RT/RW, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal secara lebih intensif.

Sebagai respons terhadap tantangan-tantangan tersebut, beberapa stakeholder telah melakukan langkah inisiatif. KPU memperluas metode penyampaian informasi dengan menggandeng media dan komunitas pemuda, Bawaslu meningkatkan pendekatan partisipatif melalui pelatihan pengawasan, dan Kesbangpol memfasilitasi forum lintas sektoral untuk menjaring aspirasi di lapangan. Upaya-upaya ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk memperkuat kolaborasi bukan hanya di tataran institusi, tetapi juga hingga ke level akar rumput.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan *collaborative governance* dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari dinamika kolaborasi, tindakan kolaboratif, serta tantangan dalam proses pelaksanaannya.

Pertama, dalam aspek dinamika kolaborasi, ditemukan proses yang cukup positif, ditandai dengan komunikasi rutin, keterbukaan informasi, serta komitmen bersama antarlembaga seperti KPU, Bawaslu, Kesbangpol, aparat keamanan, media, dan masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti perbedaan persepsi dan ego sektoral yang menghambat harmonisasi.

Kedua, tindakan kolaboratif telah diwujudkan melalui pembentukan tim teknis lintas sektor, pelaksanaan evaluasi bersama, serta pelibatan masyarakat dalam sosialisasi dan pengawasan partisipatif. Tindakan ini memperkuat efektivitas pelaksanaan pemilu yang lebih inklusif, meski koordinasi teknis dan tindak lanjut masih memerlukan penguatan.

Ketiga, dalam dimensi dampak dan adaptasi, kolaborasi telah memberikan dampak positif berupa meningkatnya partisipasi dan stabilitas politik. Namun, juga muncul dampak negatif seperti proses pengambilan keputusan yang lambat dan kelelahan birokratis, serta dampak tak terduga seperti tingginya antusiasme pemuda dan kontribusi aktif media, yang menuntut adaptasi lebih lanjut.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan tantangan utama dalam implementasi *collaborative governance*, yaitu:

1. Keterbatasan sumber daya, baik dari aspek anggaran, fasilitas, maupun dukungan teknis, yang menghambat pelaksanaan kegiatan sosialisasi secara maksimal dan merata. Ini menunjukkan lemahnya kapasitas bertindak bersama sebagaimana dikemukakan dalam teori *Collaborative Governance*.
2. Belum terbangunnya kesepahaman jangka panjang, karena kolaborasi masih bersifat situasional dan belum didukung oleh mekanisme evaluasi serta prinsip-prinsip kolaboratif berkelanjutan yang mampu memperkuat pemahaman kolektif antarlembaga.

Secara keseluruhan, proses kolaborasi di Kota Pontianak sudah menunjukkan arah yang positif, namun masih memerlukan penguatan kelembagaan, sumber daya, dan partisipasi masyarakat agar dapat mewujudkan pemilu yang lebih efektif, partisipatif, dan demokratis.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan selama proses penyusunan penelitian ini, khususnya kepada keluarga, dosen pembimbing, dan instansi terkait yang membantu menyukseskan penelitian.

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1956

VI. DAFTAR PUSTAKA

Birnir, J. K., Okthariza, N., Agustyati, K. N., & Pratama, H. M. (2025). *The Patriarchy in the Parties: Voters, parties and women's electoral fortunes in the 2024 legislative election in Indonesia. Electoral Studies*, *95*, 102938. https://doi.org/10.1016/J.ELECTSTUD.2025.102938

Bogdan, R., & Biklen, S. K. (2003). *Qualitative research for education : an introduction to theory and methods / by Robert C. Bogdan and Sari Knopp Biklen. In Qualitative Research for Education: An introduction to Theories and Methods*. https://math.buffalostate.edu/dwilson/med595/qualitative_intro.pdf

Denzin, N. K., Lincoln, Y. S., & Giardina, M. D. (2006). *Disciplining qualitative research. In International Journal of Qualitative Studies in Education* (Vol. 19, Issue 6). https://doi.org/10.1080/09518390600975990

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for *collaborative governance*. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1). https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Kumar Ranjit. (2019). *Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners - Ranjit Kumar - Google Books. In SAGE.* *file:///C:/Users/USER/Downloads/Documents/Ranjit_Kumar-Research_Methodology_A_Step-by-Step_G_2.pdf*

Labolo, M. (2023). Memahami ilmu pemerintahan. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers. http://eprints2.ipdn.ac.id/440/2/isi-Memahami%20Ilmu%20Pemerintahan.compressed.pdf

Labolo, M., & Ilham, T. (2015). Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia. Rajawali Pers. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/16

Mauluduni, A. (2022). Kolaborasi dan Konflik Antar Badan Penyelenggara Pemilu dalam Kerja Kelembagaan (*Institutional Work*) Achmad Mauludini. www.journal.kpu.go.id

Nurdin, I. N., Hartati, S., & Afriati, A. (2022). *Trend On Public Administration Research: A Bibliometric Analysis*. TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan, 57–66. https://doi.org/10.33701/jtp.v14i1.2530

Partheymüller, J., Müller, W. C., Rabitsch, A., Lidauer, M., & Grohma, P. (2022). *Participation in the administration of elections and perceptions of electoral integrity. Electoral Studies*, *77*, 102474. https://doi.org/10.1016/J.ELECTSTUD.2022.102474

Rijal Fadli, M. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *21*(1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1

Stevano Parulian Nahampun, A., Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, A., Skripsi, P., & Riyani, O. (2022). *Collaborative Governance* antara Kesbangpol dan KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14973

Stoetzer, L. F., Erfort, C., Rajski, H., Gschwend, T., Munzert, S., & Koch, E. (2025). An election forecasting model for subnational elections. *Electoral Studies*, *95*, 102939. https://doi.org/10.1016/J.ELECTSTUD.2025.102939

Tambun, F. J., Zebua, F. J. R., & Tambun, A. F. H. (2023). Komunikasi Antar Lembaga dan Diseminasi Informasi KPU dan Bawaslu dalam Mensukseskan Pemilu Tahun 2024. *CONTENT: Journal of Communication Studies*, *1*(01). https://doi.org/10.32734/cjcs.v1i01.11591

Tjenreng, M. B. Z. (2020). *Demokrasi di Indonesia melalui pilkada serentak*. Penerbit Papas Sinar Sinanti. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1003

Wasistiono, S., & Polyando, P. (2017). *Politik Desentralisasi Di Indonesia Edisi Revisi Yang Diperluas*. IPDN PRESS. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/5595